

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Menangani Pengelolaan Sampah di Kota Bireuen (Studi TPS Pasar Induk Cureh dan TPA Blang Beruru di Kota Juang)

Deya Dara Ponna¹, Teuku Alfiady², Depita Kardiati³, Muhammad Hasyem⁴, Muklir⁵
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh, Aceh^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: deya.220210221@mhs.unimal.ac.id

Diterima: 16-08-2026 | Disetujui: 22-08-2026 | Diterbitkan: 24-08-2026

ABSTRACT

The strategy of the Environmental and Forestry Agency (DLHK) of Bireuen Regency in waste management is analyzed to examine the implementation of its strategies and the factors hindering effective waste management. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants selected using purposive sampling and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that waste management strategies have been implemented through waste collection and transportation services, temporary waste storage facilities (TPS), the development of 3R waste management facilities (TPS3R), the Adiwiyata Program, the Climate Village Program (ProKlim), and the strengthening of Waste Banks. However, implementation remains suboptimal due to limited budgets, shortages of waste transportation vehicles and personnel, inactive TPS3R facilities, the continued use of open dumping at Blang Beururu Final Disposal Site, limited application of the 3R principles, and relatively passive community participation. Therefore, strengthening institutional capacity, financing, infrastructure, TPS3R revitalization, landfill modernization, regulatory enforcement, and sustained community participation is necessary to establish more effective and sustainable waste management in Bireuen Regency.

Keywords: Strategy, Waste Management, Environmental and Forestry Agency, Community Participation, Bireuen Regency.

ABSTRAK

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan strategi serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pelayanan pengangkutan dan TPS, pengembangan TPS3R, Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta penguatan Bank Sampah. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran, defisit armada dan personel, belum aktifnya TPS3R, penggunaan metode open dumping di TPA Blang Beururu, rendahnya penerapan prinsip 3R, dan partisipasi masyarakat yang masih pasif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pembiayaan dan sarana-prasarana, revitalisasi TPS3R, modernisasi TPA, penegakan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Katakunci: Strategi, Pengelolaan Sampah, DLHK, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Bireuen.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ponna, D. D. ., Alfiady, T., Kardiati, D. ., Hasyem, M. ., & Muklir, M. (2026). Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Menangani Pengelolaan Sampah di Kota Bireuen (Studi TPS Pasar Induk Cureh dan TPA Blang Beruru di Kota Juang). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3475-3483. <https://doi.org/10.63822/yfvk7e02>

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi tantangan global dan nasional yang semakin kompleks seiring pesatnya laju urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta perubahan pola konsumsi masyarakat modern. Sektor administrasi publik menempatkan tata kelola kebersihan dan pemeliharaan lingkungan sebagai salah satu indikator utama efektivitas pelayanan publik daerah (Utomo, 2024). Kegagalan dalam mengelola timbulan sampah perkotaan secara holistik dapat memicu degradasi kualitas lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta penurunan estetika wilayah (Sari & Afrinaldi, 2025). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya memosisikan penanganan sampah sebagai rutinitas teknis pengangkutan, melainkan sebagai bentuk perencanaan strategis organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keterlibatan publik.

Kondisi empiris di Kabupaten Bireuen mencerminkan urgensi permasalahan persampahan di tingkat lokal, di mana jumlah penduduk mencapai 453.242 jiwa dengan potensi timbulan sampah harian berkisar antara 181,29 ton hingga 220 ton (Hasan et al., 2024). Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Induk Curreh di Kecamatan Kota Juang menjadi salah satu titik krusial penumpukan limbah pasar dan domestik yang kerap meluap melebihi kapasitas penampungan. Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Blang Beururu di Kecamatan Peudada seluas 12,8 hektar hingga kini masih mengandalkan metode *open dumping* yang menimbulkan ancaman pencemaran air lindi dan emisi gas metana (Zulfikar & Rinaldi, 2020). Keterbatasan infrastruktur ditunjukkan oleh kondisi armada pengangkut di mana dari 24 unit truk yang ada, sebagian mengalami kerusakan berat sehingga menciptakan defisit armada, sementara alokasi anggaran APBD Bireuen sebesar Rp 14-16 miliar per tahun masih jauh di bawah batas kebutuhan ideal operasional yang diperkirakan mencapai Rp 25-28 miliar per tahun.

Urgensi penanganan masalah sampah di Kabupaten Bireuen melingkupi dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup yang saling berkait panitia dalam tata kelola daerah. Penumpukan sampah yang tercampur antara limbah organik dan anorganik memicu munculnya bau tidak sedap, vektor penyakit, serta potensi banjir akibat penyumbatan saluran drainase di pusat-pusat perdagangan (Chrisnawati & Suryani, 2020). Aspek sosial-budaya masyarakat menunjukkan masih kuatnya budaya pembuangan sampah tanpa pemilahan awal di tingkat rumah tangga serta kebiasaan membuang sampah sembarangan atau melakukan pembakaran terbuka. Pendekatan manajemen publik yang adaptif dan partisipatif sangat mutlak dibutuhkan untuk merumuskan ulang tata kelola persampahan daerah agar berorientasi pada prinsip ramah lingkungan dan pengurangan beban TPA secara berkelanjutan (Putri et al., 2023).

Kajian-kajian akademis sebelumnya tentang penanganan sampah daerah umumnya lebih banyak memfokuskan analisis pada aspek teknis-operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau sebatas deskripsi normatif peran dinas (Aqsha, 2025). Kekosongan literatur (*literature gap*) masih terlihat nyata pada belum banyaknya studi kualitatif mendalam yang menggali dinamika perumusan dan implementasi strategi kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di wilayah kabupaten berkarakteristik transisi perkotaan-perdesaan. Evaluasi teoretis terhadap interaksi antara faktor internal kelembagaan, dinamika eksternal, proses adaptasi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta strategi pelibatan partisipasi masyarakat masih sangat terbatas (Sari, 2025).

Penelitian kualitatif ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen dalam mengelola sampah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan strategi tersebut. Fokus kajian diarahkan pada analisis proses kelembagaan,

efektivitas operasional di TPS Pasar Induk Cureh dan TPA Blang Beururu, serta program-program inovasi pendukung seperti Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (ProKlim), dan penguatan Bank Sampah. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan manajemen strategis sektor publik terkait tata kelola lingkungan lokal, sementara kontribusi praktisnya memberikan rekomendasi berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*) bagi perumusan kebijakan persampahan daerah yang lebih responsif dan efektif (Rangkuti, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Perspektif administrasi publik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor utama penyelenggara pelayanan publik yang menjembatani penetapan kebijakan politik dengan penyediaan fasilitas nyata bagi masyarakat (Henry, 2013). Perkembangan teori *New Public Management* (NPM) mendorong transformasi birokrasi dari pola pelayanan konvensional menuju pendekatan manajemen yang fleksibel, efisien, berorientasi hasil, serta responsif terhadap kebutuhan lingkungan hidup (Keban, 2014). Pengelolaan persampahan sebagai bagian integral dari urusan wajib pemerintahan daerah membutuhkan sinergitas antara penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan di lapangan (Sari, 2025).

Manajemen strategis sektor publik berfungsi sebagai instrumen bagi organisasi pemerintah dalam memetakan posisi kelembagaan melalui pengintegrasian faktor internal dan eksternal secara sistematis. Kerangka analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dikembangkan oleh Rangkuti (2017) memfasilitasi perumusan strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan kelembagaan dan peluang lingkungan, seraya meminimalkan kelemahan internal dan ancaman dari luar organisasi (David, 2017). Implementasi keputusan strategis organisasi publik menurut Terry (2021) sangat dipengaruhi oleh kecukupan alokasi sumber daya, kejelasan struktur birokrasi, serta sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Landasan hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamatkan pergeseran paradigma dari sistem kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan terpadu berbasis pengurangan dan pemrosesan yang ramah lingkungan. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) memberikan mandat strategis bagi daerah untuk menurunkan volume timbulan sampah hingga tingkat sumber (Utomo, 2024). Penyesuaian regulasi di tingkat lokal seperti pembaharuan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menjadi keharusan regulatif agar mampu mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan kewajiban penutupan TPA ber-sistem *open dumping* (Zulfikar & Rinaldi, 2020).

Pendekatan pengelolaan sampah modern berlandaskan pada hirarki pengolahan limbah berbasis prinsip 3R/4R, yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang), dan *Replace* (mengganti) (Dirjen PSLB3, 2018). Penerapan prinsip *Reduce* diarahkan pada pembatasan timbulan sampah dari sumber melalui perubahan pola konsumsi dan edukasi pengurangan plastik sekali pakai (Lautania et al., 2024). Prinsip *Reuse* dan *Recycle* diwujudkan melalui pengoptimalan fungsi Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R), pengomposan sampah organik, serta penguatan rantai daur ulang

anorganik yang terintegrasi dengan sektor ekonomi kreatif (Sari & Afrinaldi, 2025).

Keberhasilan implementasi strategi persampahan sangat ditentukan oleh derajat partisipasi masyarakat sebagai produsen utama sampah rumah tangga. Partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff (1977) mencakup keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah, pemanfaatan nilai ekonomi limbah, hingga pengawasan sosial terhadap kebersihan lingkungan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan persampahan membentuk budaya kepedulian lingkungan yang mampu mengurangi beban operasional angkut-buang yang ditanggung oleh pemerintah daerah (Jayantri & Ridlo, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan memberikan pijakan empiris mendasar mengenai kompleksitas penanganan persampahan di berbagai daerah. Studi yang dilakukan Aqsha (2025) mengungkapkan bahwa strategi pengelolaan sampah perkotaan sering kali terkendala oleh minimnya sarana prasarana operasional dan lemahnya kesadaran kolektif warga. Temuan Hasan et al. (2024) memperkuat kenyataan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor penghambat utama dalam penyediaan moda pengangkutan sampah yang memadai. Penelitian Lautania et al. (2024) serta Putri et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya penguatan institusi TPS3R dan konversi metode TPA menuju *sanitary landfill* guna menekan dampak lingkungan jangka panjang, sementara Zulfikar & Rinaldi (2020) menyoroti perlunya komitmen regulatif daerah dalam penataan persampahan.

Implementasi program-program inovatif lokal seperti Program Adiwiyata di sekolah-sekolah dan Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat gampong menjadi instrumen taktis pemerintah daerah dalam menanamkan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan (Chrisnawati & Suryani, 2020). Pembentukan Bank Sampah sekolah maupun gampong dirancang untuk mentransformasi cara pandang publik agar memosisikan sampah sebagai komoditas bernilai ekonomi yang dapat dipilah dan ditukarkan (Sari, 2025). Efektivitas program-program inovatif tersebut dalam menurunkan timbulan sampah sangat tergantung pada intensitas pendampingan instansi teknis serta kesinambungan alokasi anggaran pendukung.

Kerangka konseptual penelitian kualitatif ini mengintegrasikan teori manajemen strategis publik dan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan untuk menganalisis kinerja DLHK Kabupaten Bireuen secara mendalam. Interaksi antara kekuatan internal organisasi, kelemahan operasional, peluang regulasi, serta ancaman dinamika lingkungan dianalisis secara kualitatif guna mengevaluasi realisasi strategi pengelolaan di TPS Pasar Induk CUREH dan TPA Blang Beururu (Rangkuti, 2017). Sintesis teoretis ini memandu penggalan data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghasilkan pemahaman holistik mengenai hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi daerah dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang tertib, bersih, dan berkelanjutan (Utomo, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam dan ilmiah mengenai strategi kelembagaan serta dinamika pengelolaan sampah pada kondisi objek yang alamiah. Pelaksanaan studi berlangsung sejak Juli 2025 hingga Februari 2026 yang berlokasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen, Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Induk CUREH, serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Blang Beururu. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria

pemahaman mendalam terhadap fokus penelitian, yang meliputi Sekretaris DLHK, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, petugas kebersihan, masyarakat di sekitar TPS dan TPA, serta Direktur Bank Sampah. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) dengan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan non-partisipatif, disamping pengumpulan data sekunder berupa studi dokumentasi arsip dan laporan resmi persampahan. Teknik analisis data dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan interaktif, yakni reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi guna menghasilkan analisis kualitatif yang valid dan komprehensif (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen dengan jumlah penduduk mencapai 453.242 jiwa pada tahun 2024 menghasilkan total timbunan sampah sebesar 66.173,33 ton per tahun atau setara dengan 181,29 ton per hari, dengan laju per kapita berkisar antara 0,4 kg hingga 0,5 kg per orang per hari. Sebaran pelayanan kebersihan mencakup 67 titik Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di 17 kecamatan, namun hanya 41 TPS yang dikategorikan memiliki fasilitas memadai seperti kontainer besi dan area penampungan tertutup. Sebanyak 26 titik TPS sisanya masih berupa pembuangan terbuka (*open dumping*) tanpa konstruksi standar yang diinisiasi secara swadaya oleh warga. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya persentase wilayah yang tidak terlayani armada pengangkut, yakni mencapai 18% hingga 22% dari total luas daerah.

Pengukuran komposisi sampah di TPS Pasar Induk Curreh menunjukkan dominasi sampah organik sebesar 58%, disusul sampah plastik 17%, residu 14%, kertas/karton 8%, serta logam dan kaca 3% dari total timbunan pasar yang mencapai 18–22 ton per hari. Sampah yang terkumpul di TPS umumnya berada dalam kondisi bercampur tanpa ada pemilahan awal di tingkat sumber domestik maupun pedagang. Sementara itu, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Blang Beururu di Kecamatan Peudada yang memiliki luas lahan 12,8 hektar hanya mampu menerima volume masukan sampah rata-rata 70 hingga 90,64 ton per hari. Operasional TPA masih sepenuhnya menggunakan metode pembuangan terbuka (*open dumping*) tanpa ketersediaan instalasi pengolahan air lindi, pipa ventilasi gas metana, maupun fasilitas tanggap darurat kebakaran.

Kapasitas operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen terkendala oleh defisit armada dan pendanaan yang signifikan. Laporan persampahan mencatat DLHK memiliki 24 unit armada angkut yang didominasi *dump truck* dan *armroll truck*, namun beberapa unit mengalami kerusakan berat sehingga menciptakan defisit kebutuhan riil sedikitnya 18 unit armada tambahan. Alokasi anggaran operasional persampahan daerah berada pada kisaran Rp 14–16 miliar per tahun, sementara estimasi kebutuhan ideal untuk penanganan wilayah seluas Kabupaten Bireuen memerlukan anggaran sebesar Rp 25–28 miliar per tahun. Anggaran yang terbatas ini berdampak pada minimnya alokasi bahan bakar minyak, perawatan mesin, serta pemenuhan kesejahteraan 26 orang petugas kebersihan lapangan.

Implementasi strategi pengolahan sampah berbasis komunitas diwujudkan melalui pembangunan fasilitas TPS3R di lima lokasi, meskipun seluruh fasilitas tersebut saat ini berada dalam kondisi tidak aktif. Upaya intervensi struktural dialihkan melalui pengembangan program edukasi dan kemitraan, seperti

Program Adiwiyata yang menysasar 15 sekolah dasar dan menengah, Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat gampong, serta sosialisasi reduksi sampah plastik sekali pakai. DLHK Bireuen juga mendorong pendirian Bank Sampah induk dan sekolah, seperti Bank Sampah Induk Juang Lestari dan Bank Sampah SDN 3 Percontohan Peusangan, meskipun volume pengumpulan bahan daur ulang anorganik masih relatif kecil, yakni berkisar 80–120 kg plastik layak jual per minggu.

Temuan mengenai jurang pemisah antara target perencanaan strategis dan ketersediaan alokasi anggaran mengonfirmasi teori manajemen strategis sektor publik yang dikemukakan oleh David & David (2017) serta Bryson (2018). Formulasi strategi organisasi publik tidak akan mampu dieksekusi secara optimal apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial dan teknis yang memadai. Keterbatasan anggaran APBK Bireuen yang hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan ideal operasional menyebabkan penurunan frekuensi ritase pengangkutan dan terhambatnya peremajaan armada. Fenomena ini memperkuat penelitian Hasan et al. (2024) yang menemukan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor determinan utama yang mereduksi efektivitas pelayanan persampahan di tingkat lokal.

Penggunaan metode *open dumping* di TPA Blang Beururu menunjukkan bentuk ketidaksesuaian terhadap mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan penutupan TPA terbuka dan konversi menuju *sanitary landfill* atau *controlled landfill*. Risiko pencemaran lingkungan akibat rembesan air lindi tanpa pengolahan dan emisi pembakaran terbuka (*open burning*) mempercepat reduksi daya tampung lahan yang diproyeksikan akan jenuh dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun mendatang. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Zulfikar & Rinaldi (2019) serta Putri et al. (2023), yang menegaskan bahwa kegagalan modernisasi infrastruktur TPA di daerah dipicu oleh minimnya investasi alat berat, seperti *bulldozer* dan *excavator*, serta ketiadaan desain teknis penataan lahan yang berkelanjutan.

Penerapan hirarki pengelolaan sampah berbasis prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di Kabupaten Bireuen masih tertahan pada fase sosialisasi dan belum menjadi perilaku kolektif. Dominasi sampah organik sebesar 58% di TPS Pasar Induk Curreh sebenarnya memberikan peluang besar bagi pengembangan program pengomposan komersial maupun energi terbarukan. Ketiadaan pemilahan di tingkat sumber rumah tangga dan pedagang menyebabkan seluruh jenis limbah bercampur menjadi satu, sehingga menurunkan nilai ekonomi material yang dapat didaur ulang. Kondisi ini relevan dengan kajian Lautania et al. (2024) serta Keban (2004), yang menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan sampah berbasis 3R memerlukan dukungan insentif teknis, keberadaan mesin pencacah yang beroperasi aktif, serta kepastian rantai pasok industri daur ulang.

Rendahnya partisipasi warga dalam memilah sampah dan maraknya kebiasaan membuang limbah ke saluran irigasi atau melakukan pembakaran mandiri mencerminkan tingginya hambatan sosio-kultural. Mengacu pada teori partisipasi masyarakat dari Cohen & Uphoff (1977) dan tangga partisipasi Arnstein (1969), keterlibatan publik di Bireuen masih berada pada tingkatan pasif (*manipulation/informing*). Masyarakat belum menempatkan diri sebagai subjek atau mitra aktif dalam tata kelola lingkungan, melainkan sekadar konsumen pelayanan yang enggan membayar retribusi kebersihan. Temuan ini memperkuat argumentasi Notoatmodjo (2003) dan Artiningsih et al. (2012) bahwa intervensi kebijakan regulatif tidak akan efektif tanpa disertai perubahan norma sosial dan edukasi budaya kebersihan yang terintegrasi.

Penilaian terhadap faktor penghambat strategi persampahan DLHK Bireuen secara kritis dapat

dijelaskan melalui kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III (2019). Aspek komunikasi telah dijalankan melalui kampanye lingkungan, namun hambatan fatal terletak pada kecukupan sumber daya (*resources*), baik keterbatasan jumlah personil pengangkut, keterbatasan armada, maupun defisit alokasi anggaran operasional. Aspek disposisi (*disposition*) atau komitmen pelaksana kelembagaan telah terbangun, namun kelemahan struktur birokrasi dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggar aturan kebersihan menyebabkan regulasi daerah seperti Qanun Nomor 15 Tahun 2011 kehilangan daya jangkau operasionalnya.

Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim (ProKlim) terbukti memberikan dampak positif dalam membentuk basis komunitas peduli lingkungan pada skala mikro. Pembiasaan penggunaan *tumbler* dan pemanfaatan limbah plastik sebagai media tanam di sekolah-sekolah binaan menunjukkan efektivitas strategi edukasi anak usia dini. Kendala utama terletak pada belum adanya mekanisme akumulasi dampak dari program mikro tersebut terhadap penurunan timbunan sampah secara makro di tingkat kabupaten. Sebagaimana diungkapkan Aqsha (2025) dan Suwerda dalam literatur persampahan, program kebersihan sekolah dan gampong memerlukan pendampingan rutin serta pengikatan kebijakan (*institutional binding*) agar tidak berhenti saat masa pembinaan program berakhir.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas model manajemen strategis sektor publik pada wilayah transisi urban-rural yang mengalami tekanan pertumbuhan penduduk pesat namun memiliki kapasitas fiskal terbatas. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melakukan restrukturisasi skema pembiayaan persampahan melalui pola kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), merevisi Qanun pengelolaan sampah agar selaras dengan JAKSTRADA, serta merevitalisasi TPS3R dan TPA Blang Beururu menjadi *controlled landfill*.

KESIMPULAN

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah telah dilaksanakan melalui pengangkutan dan pelayanan TPS, pengembangan TPS3R, edukasi lingkungan melalui Program Adiwiyata dan ProKlim, serta penguatan Bank Sampah, namun implementasinya belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, defisit armada dan personel, belum optimalnya fasilitas TPS3R, masih digunakannya metode *open dumping* di TPA Blang Beururu, rendahnya penerapan prinsip 3R, serta partisipasi masyarakat yang masih cenderung pasif. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan, peningkatan sarana-prasarana persampahan, revitalisasi TPS3R dan modernisasi TPA, penegakan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan agar strategi pengelolaan sampah DLHK Kabupaten Bireuen dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqsha, Y. A. (2025). Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah Di Wisata Bahari. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 5(1), 45–58.

- Chrisnawati, C., & Suryani, E. (2020). Pengelolaan sampah rumah tangga dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(2), 101–109.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson Education Limited.
- Hasan, H., Haryani, S., Zainabun, Z., Wahyuni, S., & Sofyan, H. (2024). Perbaikan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah kebun di Gampong Meunasah Papeun Kabupaten Aceh Besar. *Bulletin of Community Services*, 4(2), 21–27. <https://doi.org/10.24815/bulpengmas.v4i2.38598>
- Henry, N. (2013). *Public Administration and Public Affairs* (12th ed.). Routledge.
- Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. (2021). Strategi pengelolaan sampah di kawasan pesisir berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 112–125.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Lautania, M. F., Kadri, M., Sapha, D. A., Quadraty, M., Thahira, Z., & Saleh, M. (2024). Pengelolaan Sampah Melalui Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Pesantren Modern Al-Manar. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 4(4), 207–214.
- Putri, V. T., Raharjo, S., & Aziz, R. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah Menggunakan Analisis SWOT: Studi Kasus TPA Regional Payakumbuh. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3), 6697–6706. <https://doi.org/10.32672/jse.v8i3.5788>
- Rangkuti, F. (2017). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, H. M., & Afrinaldi, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Sungai Penuh). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(1), 228–238. <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.228-238>
- Sari, I. P. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Peran Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Governance Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 140–152.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2021). *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.
- Utomo, E. T. (2024). Evaluasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dan Strategi Efektif Pengelolaan Sampah Kota Depok. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(2), 75–88.
- Zulfikar, Z., & Rinaldi, Y. (2020). Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah dan Penataan Lingkungan Hidup. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.15120>